

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara. Dimana kabupaten ini juga sebagai lokasi yang memiliki tempat kunjungan wisata yang menarik.

Wilayah Tapanuli Utara berada pada ketinggian antara 300-1500 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah kabupaten Tapanuli Utara yang mencakup 3.793 KM², terdiri dari tanah datar seluas 3,15 %, tanah landai 26,86%, miring 25,62% dan daerah terjal 44,35%. Kabupaten ini memiliki 15 daerah kecamatan dan 232 desa. Jumlah penduduk sekitar 261.873 jiwa. Mata pencarian penduduk Tapanuli Utara sebagian besar dari hasil pertanian dan perkebunan rakyat. Kondisi ini dapat dibuktikan melalui data yang diperoleh dari BAPPEDA Tapanuli Utara (Tulus Sibuea ,01/05/2008).

Luasnya sebuah wilayah biasanya memiliki kecenderungan terjadinya kepadatan penduduk. Faktor- faktor tersebut yang pada akhirnya mempersulit bagi terciptanya masyarakat Indonesia yang mandiri. Dimana kemandirian masyarakat, menjadi pusat perhatian yang ingin di wujudkan Pemerintah pusat di Indonesia.

Namun demikian, Keterbatasan pemerintah menjalankan sistem pemerintahan maupun program kebijakan, juga menjadi tantangan yang dihadapi. Sulitnya pemerintah pusat untuk berhadapan langsung dengan masyarakat, merupakan hal utama yang menghambat pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karenanya, pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Wewenang terhadap pemerintah daerah atau sering dikatakan sebagai otonomi daerah, mendudukan pemerintah daerah sebagai agen pembantu tingkat pusat untuk mengatur daerahnya sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah juga mewujudkan konsep dukungan otonomi desa. Dimana aparatur desa berhak mengatur dan mengurus wilayah desa dan masyarakatnya sendiri. Aparatur desa dapat dikategorikan sebagai perwakilan fungsional yang dekat dengan masyarakat yang menjalankan secara langsung program pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah.

Mewujudkan figur aparatur desa yang terampil dan profesional diharapkan dapat memajukan wilayah pedesaan. Agar mampu mencapai peningkatan sumber daya manusia, dan sistem pemerintahan desa yang efisien. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak lepas dari kinerja pemerintah pusat, daerah dan desa yang optimal. Kebijakan pemerintah daerah menjadi potensi utama untuk meningkatkan *kreadibilitas* pemerintah desa dalam menjalankan tupoksinya.

Adapun pencapaian pemberdayaan masyarakat berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Bab I Pasal 1 (12) yang menyatakan :

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Masyarakat yang sejahtera dapat dikategorikan sebagai masyarakat mandiri dan memiliki kemampuan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam lingkungan sosial masyarakat maupun menjalankan roda pemerintahan. Dengan adanya otonomi, Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan desa tetap terjalin, walau sudah diberikanya wewenang terhadap pemerintah desa. Peran perangkat pemerintah daerah sangat penting dalam mengkoordinir setiap aktivitas pemerintahan desa agar memiliki kapabilitas untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Kebijakan dan pelaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, ditujukan untuk dijalankan pemerintah desa agar bermuara pada pencapaian pembangunan pedesaan, yakni terciptanya peningkatan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur dan ekonomi pedesaan, serta ketertiban dari permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat desa.

Terbatasnya wewenang yang dimiliki pemerintah desa dalam mengkalkulasikan kebijakan di wilayah desa, menjadi keterbatasan yang diluar kemampuan pemerintah desa. Kebijakan dari pemerintahan daerah menjadi objek utama yang dijalankan. Maka penting keterlibatan pemerintah daerah dalam mengaktualisasikan program kebijakan yang akan dijalankan pemerintah desa secara efisien. Partisipasi aktif pemerintahan daerah sangat diperlukan dalam membuat program kebijakan, pengevaluasian, dan mengkoordinir pengelolaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta pelaksanaan program kegiatan kemasyarakatan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam mengawasi atau mengkoordinir kinerja aparatur desa di Tapanuli Utara, pemerintah daerah membuat aspek pembantu lainnya yaitu Dibentuknya struktur organisasi pemerintahan daerah yang dikhususkan mewujudkan pemberdayaan masyarakat, dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat desa Tapanuli Utara, diamanatkan dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 43 Tahun 2008 yang memberi wewenang terhadap instansi pemerintahan BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Tapanuli Utara. Hal tersebut sebagai wujud perhatian akan pentingnya sistem pemerintahan dan kebijakan yang baik dalam mewujudkan kinerja aparatur desa yang optimal dan memfasilitasinya dengan kemampuan, keterampilan, serta keprofosionalannya dalam menjalankan tupoksinya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, serta pedesaan yang maju.

Berdasarkan persoalan pembangunan desa yang terjadi pada setiap desa di Tapanuli Utara, Bupati Tapanuli utara Nikson Nababan- Mauliate Simorangkir membuat kebijakan yang sedang berjalan, namun pembangunan belum terwujud

secara merata yaitu (Sibarani TSC. 30 September 2015 | 9/30/2015 08:48:00 PM)

Dari sektor pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat umum, seperti jalan-jalan, pasar siborongborong, pasar pagaran, pasar onan hasang, dan lain sebagainya juga turut dibenahi. Bangunan-bangunan yang dahulu hanya merupakan peninggalan pemerintahan terdahulu mulai dipugar, sekolah-sekolah mulai dibangun dan tidak sedikit yang direhab total. Listrik-listrik sudah menerangi rumah-rumah penduduk. Tercatat ada beberapa sekolah yang telah berdiri di era kepemimpinan Torang Lumbantobing, salah satunya adalah SMA Negeri 3 Tarutung, SMA yang dirancang dan diharapkan menjadi sekolah plus di Tapanuli Utara untuk tingkat lanjutan atas. Sektor kesehatan juga telah cukup memadai,

pembangunan sarana pelayanan kesehatan di beberapa daerah sudah dibangun, seperti di Desa Robean Kecamatan Purbatua. Renovasi dan pembangunan gedung-gedung baru di Rumah Sakit Umum Tarutung juga telah cukup signifikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang kian hari kian meningkat. Dari sektor industri juga tidak ketinggalan. Promosi-promosi produk Home Industry (industri rumahan), seperti kacang sihobuk, tenun ulos, dan lain sebagainya semakin gencar, dibuktikan dengan kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan Badan Usaha Kecil dan Menengah, Dewan Kerajinan dan Seni Daerah, dan beberapa lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pernyataan tersebut masih rencana yang berjalan sementara dan masih

kajian rencana yang masih tertuang dalam lembaran kertas. Pembangunan wilayah yang berjalan masih terjadi di beberapa wilayah dan hanya terjadi di pusat yang dekat dengan kecamatan, sedangkan masih banyak desa lokal yang belum mengalami perubahan. Faktanya Sementara ini kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara yang belum terwujud secara merata. Banyak faktor penyebabnya, diantaranya kinerja aparatur desa dan pengawasan BPMPD TAPUT yang belum optimal. Hal tersebut disebabkan kurang maksimalnya pedoman keterampilan, prestasi, disiplin kerja yang harus dimiliki aparatur pemerintahan.

Hingga faktanya penyelenggaraan pemerintahan desa di Tapanuli Utara, dikualifikasikan masih belum dapat menyelesaikan tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya pendidikan dasar, kesehatan serta keterjangkauan desa yang belum tercapai di wilayah Tapanuli Utara. sering sekali masyarakat tidak puas terhadap pelaksanaan program pemerintahan di tingkat kabupaten hingga pedesaan.

Ditemukannya aparatur pemerintahan yang belum dapat mewujudkan harapan masyarakat, Sistem pemerintahan yang baik, kebijakan pemerintah yang tidak tepat, dibidang pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana desa yang tidak merata. Persoalan yang berat dan minimnya kualitas kinerja menjadi tugas

berat yang dibebankan pada “pundak” BPMPD dan pemerintahan desa di Tapanuli Utara. dibutuhkannya Kebijakan penguatan kelembagaan desa, dan fasilitasi Pemerintahan Desa serta melaksanakan Ketatausahaan Badan untuk dapat mengatasi persoalan yang dihadapi pemerintahan desa dan masyarakat secara khusus.

Keberhasilan dan kemerosotan kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari kinerja BPMPD Tapanuli Utara. Oleh karena itu, maka penting untuk menilai peran pemerintah daerah pada tiap level dalam mendorong integritas kepemimpinan aparatur desa dan loyalitasnya. Sehingga akan dihasilkan tingkat pencapaian pelaksanaan tupoksinya sesuai mekanisme program kebijakan pemerintahan desa di Tapanuli Utara. Dengan demikian peneliti mengkonsepkannya dalam sebuah judul penelitian, yaitu “**Analisis Kinerja BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa) Tapanuli Utara Dalam Mengupayakan Peningkatan Kinerja Aparatur Desa Di Kabupaten Tapanuli Utara**”.

B. Identifikasi Masalah

Dalam suatu penelitian perlu diidentifikasi masalah yang akan diteliti menjadi terarah dan jelas tujuannya. Agar tidak menimbulkan pemikiran yang simpang siur. Sehingga melalui identifikasi masalah ini, dapat membawa peneliti melakukan penelitian yang mendalam.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya upaya pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja pemerintah desa;
2. Belum terwujudnya aparatur desa yang profesional serta memiliki keterampilan, kemampuan, prestasi dalam menyelenggarakan pemerintahan;
3. Kurang berkualitasnya kepemimpinan perangkat Desa;
4. Sistem pemerintahan dan kebijakan pemerintah yang tidak tepat dibidang pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana desa yang tidak merata;
5. Kebijakan penguatan kelembagaan desa, dan fasilitasi Pemerintahan Desa serta melaksanakan Ketatausahaan Badan yang tidak dapat mengatasi persoalan yang dihadapi pemerintahan desa dan masyarakat secara khusus;
6. Ketidakmampuan BPMPD dalam mengevaluasi kinerja aparatur desa yang tidak maksimal menjalankan tupoksinya;
7. Kurang maksimalnya kinerja pemerintahan desa di Tapanuli Utara
8. Tidak maksimalnya peranan BPMPD dalam meningkatkan kinerja aparatur desa;

C. Fokus Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurang maksimalnya kinerja aparatur desa di Tapanuli Utara
2. Upaya BPMPD Tapanuli Utara dalam meningkatkan kinerja aparatur desa di Kabupaten Tapanuli Utara dalam menjalankan tupoksinya”.

D. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah penulis membuat rumusan spesifikasi terhadap hakikat masalah yang diteliti. Banyaknya kajian permasalahan tentang kinerja BPMPD tidak memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara keseluruhan aspek kinerja BPMPD. Maka peneliti akan mengambil suatu kajian penelitian yang difokuskan pada aspek meningkatkan kinerja BPMPD. Fokus penelitian ini dikonsepsikan dengan pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Mengapa kinerja aparatatur desa di Tapanuli Utara tidak maksimal ?
2. Bagaimana upaya BPMPD Tapanuli Utara dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Desa dalam menjalankan tupoksinya ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara ilmiah, untuk itu penelitian ini bertujuan, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan kurang maksimalnya kinerja aparatatur desa di Tapanuli Utara.
2. Untuk mengetahui upaya BPMPD Tapanuli Utara dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Desa dalam menjalankan tupoksinya.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini bermanfaat sebagai penambah referensi bagi para mahasiswa, khususnya Departemen PKn- FIS Unimed.
2. Bagi penulis penelitian ini sangat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan berfikir dan menulis karya ilmiah di bidang sosial politik kewarganegaraan dengan fenomena politik yang terjadi.
3. Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang bagaimana Kinerja BPMPD dalam membuat program kerja untuk meningkatkan kinerja aparatur desa, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi semua kalangan dalam membuat penelitian mengenai BPMPD.